
Pendidikan Keagamaan Islam Pada Masa Pemerintahan Reformasi

Umi Fitri Lestari¹, Amril M², Wiji Lestari³

^{1,2}UIN Suska Riau, ³STAI Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian

lestariumifitri@gmail.com¹, amrilmm@uin-suska.ac.id², wijilestari391@guru.sd.belajar.id³

ABSTRACT; *Islamic religious education in Indonesia underwent significant transformation during the reform era. This change was driven by the community's demand for more open and inclusive education, as well as the influence of globalization that brought various new ideas. In this journal, it will be discussed how Islamic religious education adapts to social and political dynamics, as well as the challenges it faces. Through data analysis and case studies, it is hoped to provide a clear picture of the development of Islamic religious education during the reform era. This change impacts the improvement of education quality, more equitable accessibility even to remote areas, as well as the strengthening of Islamic values in learning and social empowerment through Islamic educational institutions such as madrasahs, pesantren, and majlis taklim. The Islamic education curriculum has become more flexible and relevant to the times, supported by the use of information technology in learning. The challenges faced include disparities in quality between regions, issues of radicalism, and the demands of globalization, necessitating collaboration between the government, educational institutions, and society to create an inclusive and moderate Islamic education system. Overall, Islamic religious education during the Reform era has shown significant progress in recognition, quality, and relevance, and plays an important role in the development of the Muslim community and the Indonesian nation moving forward.*

Keywords: *Education, Islamic Religion, Reform.*

ABSTRAK; Pendidikan keagamaan Islam di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan pada masa pemerintahan reformasi. Perubahan ini dipicu oleh tuntutan masyarakat akan pendidikan yang lebih terbuka dan inklusif, serta pengaruh globalisasi yang membawa berbagai pemikiran baru. Dalam jurnal ini, akan dibahas bagaimana pendidikan keagamaan Islam beradaptasi dengan dinamika sosial dan politik, serta tantangan yang dihadapinya. Melalui analisis data dan contoh kasus, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan pendidikan keagamaan Islam pada era reformasi. Perubahan ini berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan, aksesibilitas yang lebih merata hingga ke daerah terpencil, serta penguatan nilai-nilai Islam dalam pembelajaran dan pemberdayaan sosial melalui lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, pondok pesantren, dan majlis taklim. Kurikulum pendidikan Islam menjadi lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman, serta didukung penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran. Tantangan yang dihadapi meliputi disparitas kualitas antar daerah, isu radikalisme, dan tuntutan globalisasi, sehingga

diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem pendidikan Islam yang inklusif dan moderat, Secara keseluruhan, pendidikan keagamaan Islam pada masa Reformasi menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengakuan, kualitas, dan relevansi, serta memainkan peran penting dalam pembangunan umat dan bangsa Indonesia ke depan.

Kata Kunci: Pendidikan, Keagamaan Islam, Reformasi

PENDAHULUAN

Pendidikan keagamaan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan moral masyarakat. Sejak masa sebelum reformasi, pendidikan ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat Muslim. Namun, pada masa reformasi yang dimulai pada tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Reformasi membawa angin segar bagi kebebasan berpendapat dan berorganisasi, yang berdampak pada pendidikan keagamaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, meningkat pesat setelah reformasi, mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan keagamaan

Pendidikan keagamaan juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pemerintah. Pendidikan keagamaan sering terpinggirkan dari sistem pendidikan nasional sebelum reformasi. Namun, setelah reformasi, pemerintah mulai mengakui pentingnya pendidikan keagamaan dan berusaha untuk memasukkannya ke dalam kurikulum nasional. Kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Agama yang mendorong pembentukan madrasah dan institusi pendidikan Islam lainnya menunjukkan hal ini. Oleh karena itu, selama masa reformasi, pendidikan keagamaan Islam digunakan tidak hanya untuk mempelajari agama tetapi juga untuk meningkatkan karakter bangsa.

Analisis kebijakan pendidikan mengumpulkan informasi tentang pendidikan dari berbagai sumber dan digunakan sebagai referensi untuk membuat alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah kependidikan. Analisis kebijakan pendidikan tidak hanya melihat data dan informasi pendidikan; itu juga melihat semua aspek proses pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, penyatuan informasi, penentuan alternatif, dan menyampaikan alternatif tersebut kepada para pembuat keputusan pendidikan.

Pemerintah Republik Indonesia meluncurkan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 sebagai pengganti UU No 2 Tahun 1989 selama periode reformasi. Menurut UU tersebut, setiap siswa

berhak mendapatkan pendidikan agama dari guru yang seagama dengan mereka. Selain tersebut RUU RI No. 20 Tahun 2003 menetapkan kesetaraan pendidikan pesantren dengan sekolah umum, tetapi pelaksanaannya menjadi sulit karena banyak pro dan kontra, yang menyebabkan perdebatan di DPR. Setiap golongan DPR ingin kepentingan dan pola pikir mereka dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Termasuk instruksi agama. Beberapa nasionalis dan komunitas nasrani menentang masuknya pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional.

Tapi sebelum reformasi, pendidikan keagamaan menghadapi batasan pada kebebasan berpendapat dan berorganisasi. Banyak institusi pendidikan keagamaan terpaksa menerapkan aturan yang ketat. Hal ini menghambat kreativitas dan pembuatan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan keagamaan dalam konteks ini seringkali terjebak dalam tradisi dan kurang mampu mengikuti perkembangan zaman.

Banyak ruang untuk kebijakan pendidikan baru yang reformatif dan revolusioner telah dibuka selama periode reformasi ini. Bahkan, sistem pendidikan telah berubah dari sentralistik (orde lama) ke desentralistik (orde baru dan reformasi). Tentu saja, penyempurnaan kebijakan selalu diperlukan untuk menghasilkan generasi berikutnya dari negara yang memiliki standar tinggi. Namun demikian, seperti yang telah diketahui dan dibahas sebelumnya, keadaan politik yang berubah selalu memengaruhi penentuan kebijakan di bidang pendidikan. Untuk mengetahuinya, Anda harus melakukan penelusuran sejarah tentang proses pembuatan kebijakan.¹

Dengan demikian, sistem penyelenggaraan pendidikan Islam pada era Reformasi tidak hanya menciptakan peluang pendidikan yang lebih luas, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan Islam di Indonesia berkualitas, relevan, dan inklusif. Reformasi ini membawa perubahan positif secara mendalam untuk mengembangkan potensi generasi muda Indonesia, tidak hanya sebagai individu yang berilmu, tetapi sebagai warga negara yang berkepribadian, toleran, dan berkualitas.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai kebijakan pendidikan agama Islam pada masa reformasi, menganalisis kurikulum yang dipakai, serta memberikan informasi terkait inovasi dan perkembangan kebijakan pada masa reformasi.

¹ Tiara dan Hudaidah, 'Sistem Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3.2 (2021), pp. 158–63.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini, metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan berbagai sumber data dari laporan resmi, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik pendidikan keagamaan Islam pada masa reformasi. Selain itu, wawancara dengan beberapa tokoh pendidikan dan pengelola lembaga pendidikan keagamaan juga dilakukan untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam mengenai perkembangan dan tantangan yang dihadapi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam perkembangan pendidikan keagamaan Islam. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi pendidikan keagamaan Islam di Indonesia pada masa reformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Keagamaan Islam pada Masa Reformasi

Reformasi dimulai sejak berakhirnya masa orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Lengsernya Soeharto dari kepresidenan pada tahun 1998 menjadi tonggak dimulainya pendidikan Islam pada masa reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Menurut Arti kata dalam bahasa Indonesia adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Di Indonesia, kata Reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru.

Dengan demikian, reformasi dapat dimaknai sebagai usaha untuk membenahi seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam masalah pendidikan. Reformasi juga berarti perubahan dengan melihat keperluan di masa depan, menekankan kembali pada bentuk asal, berbuat lebih baik dengan menghentikan penyimpangan-penyimpangan dan praktek yang salah atau memperkenalkan prosedur yang lebih baik, suatu perombakan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum, sosial dan tentu saja termasuk dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan Islam.²

Mengenai keadaan perkembangan system pendidikan islam pada abad pertengahan sebelum datangnya dampak barat bahwa di abad abad ini terjadi kemerosotan yang nyata

² 'Indo Green Journal', 2 (2024), pp. 152–60.

bahkan kemacetan dalam kehidupan intelektual dunia islam. Dari abad ke tiga belas, empat belas dan seterusnya, era buku pegangan buku-buku komentar dan sub-komentar. Bahwa banyak kemampuan kreatif asli menjadi terpendam begitu saja dalam karya-karya yang umumnya sangat membosankan dan mengulang ulang, dan bahwa di iran terdapat orisinalitas dalam filsafat, adalah tidak bisa diragukan tetapi secara keseluruhan literature literature ini tidak orisinal using dan superficial. Sekalipun demikian negeri yang paling berkembang dalam hal spesifikasi, walaupun tidak orisinal adalah turki dan mesir terutama karena pendidikan tradisional di kedua Negara ini sangat terorganisasi dan Terkonsentrasi Kebijakan yang berbeda dalam bidang apapun pada dasarnya dibuat untuk menangani semua masalah masyarakat.³

Kebijakan sebenarnya dapat menyelesaikan masalah, tetapi kadang-kadang mereka bahkan membuat masalah baru. Ketika era orde lama berakhir pada tahun 1998, sistem pendidikan masih menggunakan UU Pendidikan tahun 1989 dan kurikulum 1994. Banyak orang berharap reformasi dan pembaharuan sistem pendidikan akan menjadi topik penting bagi para pemerhati pendidikan setelah rezim orde lama yang dipimpin oleh Soeharto runtuh.

Dengan 4.444 anak, remaja, dan bahkan orang dewasa, pendidikan agama Islam harus diperkenalkan dan dikomunikasikan sejak dini. Dalam pendidikan Islam, istilah "pendidikan sepanjang hidup" diakui. Pemahaman setiap orang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, karena setiap langkah manusia pada dasarnya atau tidak berhenti belajar. Meskipun ada banyak kritik yang diajukan oleh berbagai kelompok atau praktik pendidikan, hampir semua partai politik setuju bahwa kontribusi pendidikan sangat penting untuk masa depan sebuah masyarakat atau negara. Misalnya, mereka percaya bahwa pendidikan dapat membantu budaya masa depan.⁴

Pendidikan agama di Indonesia menarik untuk terus disimak karena keberadaannya yang unik dalam hubungannya dengan kebijakan Negara Indonesia yang mengaku bukan Negara Islam dan pula bukan Negara sekular. Klaim ini menempatkan pendidikan agama (Islam) sebagai instrument dinamis dalam perjalanan bangsa Indonesia semenjak kemerdekaannya. Seperti yang dinyatakan oleh Atho' Muzhar dalam tesis masternya di Quensland University bahwa pendidikan agama (Islam) di Indonesia lebih terasa sebagai pertarungan kepentingan

³ Anang Romli, 'Sejarah Sosial Reformasi Pendidikan Islam', *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4.2 (2021), pp. 80–87, doi:10.58518/darajat.v4i2.711.

⁴ Abdul Hayi and Mohamad Alwi, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Di Era Reformasi', *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 14.1 (2023), pp. 85–95, doi:10.47625/fitrah.v14i1.447.

politik antara kelompok Muslim.⁵

Hal ini semua tidak terlepas dari perspektif Indonesia yang mengidentifikasikan dirinya bukan sebagai negara sekular dan bukan pula Negara agama. Indonesia mengidentifikasikan dirinya sebagai Negara berketuhanan, di mana agama-agama dapat berjalan bebas di dalamnya. Indonesia bukan Negara Islam tapi Indonesia adalah Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Beranjak dari kesepahaman atas hal tersebut tentu pendidikan agama dan keagamaan tak bisa dipisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perdebatan bisa jadi ada, karena banyak para pemikir dan tokoh-tokoh politik di Indonesia terpengaruh oleh gagasan Negara sekuler yang diadopsi dari Negara-negara Barat kontemporer dan banyak pula yang tertarik dalam konsep negara agama yang dipengaruhi oleh Negara-negara Arab yang ada baik yang republik maupun monarki. Tarik menarik dalam perdebatan pendidikan agama dan keagamaan biasanya melibatkan dua kelompok ini. Tapi semua kelompok tersebut sadar bahwa menjaga Indonesia adalah yang terpenting dalam politik berbangsa dan bernegara. Tanpa itu semua, mungkin Indonesia hanya tinggal cerita.⁶

Setelah perubahan yang mendorong kebebasan berpendapat dan berbicara, berbagai ideologi muncul, termasuk di bidang pendidikan. Pertumbuhan institusi pendidikan setelah reformasi cenderung bernuansa agama. Hal ini dilihat dari begitu dominannya kemunculan sekolah-sekolah dengan label Islam, termasuk lembaga non-sekolah..⁷

Sejak awal abad ke-20, masyarakat Muslim di Indonesia telah melakukan reformasi (pembaharuan). Reformasi ini dirintis oleh tokoh pelopor pembaharu pendidikan Islam Minangkabau, seperti Syekh Abdullah Ahmad, Zainudin Labai El-Yunus dan lain-lain, juga dalam bentuk organisasi-organisasi Islam seperti Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), dan Nahdatul Ulama di daerah lain. Akan tetapi, perubahan itu memiliki motivasi yang betul-betul pragmatis, yaitu bagaimana mengimbangi pendidikan umum yang berkembang pesat yang semata-mata diorientasikan pada pemenuhan

kebutuhan kolonialisme. Mengikuti pertimbangan dan perubahan zaman yang cepat, dengan proses perkembangan teknologi oleh pengguna ilmu pengetahuan terapan, dilandasi

⁵ Iksan Kamil Sahri, 'Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam Masa Reformasi', *Tarbawi*, 7.1 (2018), pp. 47–60, doi:10.36781/tarbawi.v7i1.2976.

⁶ Sahri, 'Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam Masa Reformasi'.

⁷ Fahri Hidayat, 'Pertumbuhan Ideologi Pendidikan Di Era Reformasi (Kajian Terhadap Ideologi Pendidikan Di Kuttab Al-Fatih Purwokerto)', *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 8.2 (2018), p. 85, doi:10.21927/literasi.2017.8(2).85-98.

dengan ekspansi produk besar-besardengan menggunakan tenaga mesin untuk tujaun pasaran yang luas bagi barang-barang produsen maupun konsumen, melalui angkatan kerja yang terspesialisasikan dengan pembagian kerja, seluruhnya disertai oleh urbanisasi yang meningkat, yang dikenal dengan era industrialisasi dan globalisasi.⁸

Dalam era reformasi, tidak hanya diperlukan perubahan struktural dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, tetapi juga perubahan kultural untuk mengisi perubahan struktural tersebut. Pendidikan dapat membantu menumbuhkan sikap demokratis dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat luas. Pendidikan formal, nonformal, dan informal secara keseluruhan dapat membangun masyarakat demokratis yang diinginkan.⁹

B. Kurikulum Pendidikan Islam pada masa Reformasi

Setelah UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003, pemerintah mengeluarkan kebijakan perubahan kurikulum, seperti KBK 2004, KTSP 2006, dan Kurikulum 2013. Kebijakan ini memberikan manfaat bagi lembaga, tetapi juga menyebabkan masalah bagi lembaga. Pada KBK, lembaga menghadapi masalah karena berdampak pada perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan pada KTSP, lembaga dapat mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lembaga. Selain itu, karena berupa angka, memudahkan guru untuk menginput nilai. Ini berbeda dengan KBK, yang penilaiannya harus dijelaskan dalam bentuk kalimat.¹⁰

Pada masa reformasi ini telah dikembangkan dua model kurikulum, yaitu kurikulum KBK pada tahun 2004 dan KTSP pada tahun 2006, Dalam KBK tahun 2004 untuk mata pelajaran PAI (kita ambil contoh di jenjang SMP), Standar Kompetensi yang disajikan sangat sederhana tapi cukup mendalam dan mencerminkan standar kompetensi pendidikan Islam yang menyeluruh.¹¹

Kurikulum Pendidikan Agama Islam Masa Reformasi Di bawah ini adalah model kurikulum yang berlangsung selama masa Reformasi antara lain:

1. Kurikulum KBK.

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan

⁸ Subkhi Mahmasani, 'View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk', 2020, pp. 274–82.

⁹ Siti Aisyah, 'Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)', *Journal of Islamic Education El Madani*, 2.1 (2023), pp. 47–56, doi:10.55438/jiee.v2i1.39.

¹⁰ Dr. Saifullah Isri MA., 'Kebijakan Pendidikan Islam', *Semesta Aksara, DIY Yogyakarta* (2021), pp. 212–13.

¹¹ Dosen Pengampuh Sunasti, S Pd, and S I Pd, 'MAKALAH SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam Pada Masa Re f Ormasi ', 2021.

kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Era ini memiliki visi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah NKRI.

2. Kurikulum Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006. Secara umum KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.¹²

C. Inovasi dan Perkembangan Pendidikan Keagamaan Islam pada masa reformasi

Peningkatan aksesibilitas sekolah Islam pada era Reformasi adalah komponen penting dari sistem. Lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan Islam berkualitas tinggi. Pendidikan Islam tidak hanya terpusat di perkotaan karena banyak sekolah Islam didirikan di berbagai tempat, termasuk di daerah terpencil. Hal ini memungkinkan generasi muda mendapatkan pendidikan agama yang mendalam terlepas dari latar belakang ekonomi dan geografis mereka.

Selain itu, selama era Reformasi, sistem pendidikan Islam mengalami peningkatan kurikulum dan teknik pengajaran. Kursi pendidikan Islam diubah untuk memasukkan materi yang relevan dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran membuat akses siswa ke sumber pembelajaran lebih mudah dan efektif. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang penuh dengan aktivitas dan dinamis.¹³

Agama telah digunakan oleh pemerintah Indonesia sejak merdeka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, kita dapat menemukan hal ini. Dalam pembukaan UUD 1945, alinea ketiga menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah semata-mata berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, dan bahwa Pancasila adalah dasar negara.

Namun, melihat kembali bagaimana para pemimpin terkemuka di negeri ini menafsirkan ideologi Pancasila dan menerapkannya dalam pendidikan Islam selama Orde Reformasi.

¹² Ah. Zakki Fuad, 'Tantangan Dan Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital', *Thesis*, September, 2023, pp. 1–17.

¹³ Rr Kusuma Dwi and others, *KONSEP BELAJAR PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN MODERN (Kajian Kitab Ayyuhā Al-Walad Fī Nasīhati Al-Mutawa Law'izatihim Liya 'lamū Wa Yumayyizū 'Ilman Nāfi'an Min Gayathi)*.

Pendidikan Islam dan lembaga pendidikan Islam mendapatkan dorongan baru dari masa reformasi yang bergulirnya, yang salah satunya adalah demokratisasi. Diharapkan bahwa keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan akan mengubah proses dan manajemen pendidikan Islam. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut secara eksplisit mengatur bagaimana Pendidikan Keagamaan Islam dan Keagamaan diselenggarakan.

Ayat 1 Pasal 9 menyatakan bahwa pendidikan agama meliputi pendidikan agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Pasal ini berfungsi sebagai bagian yang luas untuk menjelaskan ruang lingkup pendidikan agama. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama, Menteri Agama bertanggung jawab sebagai pengelola. Namun, fakta saat ini tetap menarik: Pendidikan Islam berada di urutan kedua setelah Pendidikan Nasional. Institusi yang memberikan pendidikan Islam tidak banyak diminati dibandingkan dengan institusi lain yang dianggap memiliki prospek yang lebih baik. Sampai saat ini, status Pendidikan Islam masih bertahan sebagai sebuah komponen dari sistem pendidikan nasional.¹⁴

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Desentralisasi, demokratisasi, dan keterbukaan yang menjadi ciri khas era ini telah memberikan peluang baru sekaligus tantangan bagi lembaga pendidikan Islam. Dalam konteks kebijakan, pendidikan Islam memperoleh penguatan melalui undang-undang yang mengatur desentralisasi dan sistem pendidikan nasional. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan otonomi lembaga pendidikan Islam, tetapi juga mendorong inovasi kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Pendidikan Islam di Era Reformasi telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan bangsa dengan segala tantangan dan peluang yang ada. Melalui inovasi dan adaptasi yang berkelanjutan, pendidikan Islam tidak hanya memiliki potensi untuk mempertahankan relevansinya di tingkat nasional, tetapi juga memiliki potensi untuk berkontribusi secara global. Oleh karena itu, untuk menjaga esensi nilai-nilai keislaman sekaligus mengatasi tantangan zaman, pendidikan Islam harus terus didukung oleh semua pihak—pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan itu sendiri.

¹⁴ Marzuenda Marzuenda and Usman Usman, 'Kebijakan Pendidikan Islam Masa Reformasi', *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 11.1 (2022), pp. 61–74, doi:10.46781/kreatifitas.v11i1.535.

KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis tentang pendidikan Islam selama era reformasi di Indonesia menunjukkan perubahan besar dalam pendekatan, kebijakan, dan praktik pendidikan agama Islam. Perubahan ini terjadi di berbagai tingkatan lembaga pendidikan, mulai dari sekolah umum hingga pondok pesantren dan majlis taklim. Pertama, pendidikan Islam dimasukkan ke dalam kurikulum dan diakui secara resmi sebagai komponen penting dari sistem pendidikan nasional.

Integrasi ini memastikan bahwa siswa mendapatkan pendidikan yang menyeluruh yang mencakup aspek agama dan umum, dan memberi mereka kesempatan untuk memilih pendekatan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Selain itu, lembaga pendidikan Islam diberikan kebebasan dan autonomi selama reformasi. Mereka dapat mengatur program pendidikan, mengelola manajemen, dan mengatur sumber daya mereka sendiri. Kursi pendidikan Islam diubah untuk memasukkan materi yang relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti, 'Pendidikan Islam Pada Masa Reformasi (1998-Sekarang)', *Journal of Islamic Education El Madani*, 2.1 (2023), pp. 47–56, doi:10.55438/jiee.v2i1.39
- Anang Romli, 'Sejarah Sosial Reformasi Pendidikan Islam', *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4.2 (2021), pp. 80–87, doi:10.58518/darajat.v4i2.711
- Dwi, Rr Kusuma, Nur Ma'rifati, Fathul Amin, and Rifa ' Afwah, *KONSEP BELAJAR PERSPEKTIF IMAM AL-GHAZALI DITINJAU DARI PERSPEKTIF PENDIDIKAN MODERN (Kajian Kitab Ayyuhā Al-Walad Fī Nasīhati Al-Mutawa Law'izatihim Liya'lamū Wa Yumayyizū 'Ilman Nāfi'an Min Gayathi)*
- Fuad, Ah. Zakki, 'Tantangan Dan Inovasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Era Digital', *Thesis*, September, 2023, pp. 1–17
- Hayi, Abdul, and Mohamad Alwi, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Indonesia Di Era Reformasi', *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 14.1 (2023), pp. 85–95, doi:10.47625/fitrah.v14i1.447
- Hidayat, Fahri, 'Pertumbuhan Ideologi Pendidikan Di Era Reformasi (Kajian Terhadap Ideologi Pendidikan Di Kuttab Al Fatih Purwokerto)', *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 8.2 (2018), p. 85, doi:10.21927/literasi.2017.8(2).85-98
- 'Indo Green Journal', 2 (2024), pp. 152–60

-
- Saifullah Isri, 'Kebijakan Pendidikan Islam', *Semesta Aksara, DIY Yogyakarta* (2021), pp. 212–13
- Marzuenda, Marzuenda, and Usman Usman, 'Kebijakan Pendidikan Islam Masa Reformasi', *Kreatifitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 11.1 (2022), pp. 61–74, doi:10.46781/kreatifitas.v11i1.535
- Nuri, Mei, Hafidha Sari, Ewiniarti Hawa, Febby Aulia Sari, and Mahfud Ifendi, 'Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Era Reformasi', 2 (2024), pp. 127–33, doi:10.59966/isedu.v2i2.1516
- Sahri, Iksan Kamil, 'Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam Masa Reformasi', *Tarbawi*, 7.1 (2018), pp. 47–60, doi:10.36781/tarbawi.v7i1.2976
- Subkhi Mahmasani, 'View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk', 2020, pp. 274–82
- Sunasti, Dosen Pengampuh, S Pd, and S I Pd, 'MAKALAH SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam Pada Masa Re f Ormasi ', 2021
- Tiara dan Hudaidah, 'Sistem Dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Kajian Sejarah*, 3.2 (2021), pp. 158–63